

**REFORMASI REGULASI BIDANG HUKUM
EKONOMI UNTUK MENCAPAI PERBAIKAN
PERINGKAT INDEKS EASE OF DOING BUSINESS :
Studi 2015-2020**

DAFTAR ISI

Cover	
Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian Disertasi.....	ii
Lembar Persetujuan Disertasi	iii
Persetujuan Dosen Pembimbing Disertasi	iv
Pengesahan Tim Penguji Sidang Terbuka.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xix
Daftar Gambar	xx
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1 Upaya Peningkatan Daya Saing Pemerintah.....	7
1.1.2 Situasi Umum Kualitas Regulasi Terkait Memulai Usaha di Indonesia.....	14
1.1.2.1 Parameter Analisis Kebijakan.....	14
1.1.2.2 Parameter Komparatif.....	16
1.1.2.3. Parameter Empiris.....	17
1.1.3. Penghentian Penerbitan Indeks <i>Ease of Doing Business</i> pada 2021 dan Relevansinya Bagi Penelitian.....	19
1.2. Rumusan Masalah	23
1.3. Keaslian Penelitian	25

1.4. Tujuan.....	25
1.5. Manfaat.....	26
1.6. Sistematika Penulisan.....	26
Bab II Tinjauan Pustaka	29
2.1. Landasan Teori	29
2.1.1. Teori Tujuan Hukum.....	29
2.1.2. Teori Hukum Responsif	34
2.1.2.1. Hukum Represif	38
2.1.2.2. Hukum Otonom	40
2.1.2.3. Hukum Responsif.....	42
2.1.3. Teori Sistem Hukum	45
2.1.3.1. Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>).....	45
2.1.3.2. Substansi hukum (<i>Legal Substance</i>)	46
2.1.3.3. Budaya hukum (<i>Legal Culture</i>).....	47
2.2. Landasan Konseptual.....	48
2.2.1. Metode <i>Economic Analysis of Law</i>	48
2.1.4.1. Umum	48
2.1.4.2. Perjalanan <i>Economic Analysis of Law</i>	50
2.1.4.3. Konsep Dasar <i>Economic Analysis of Law</i>	55
a. Konsep Pilihan Rasional (<i>Rationale Choice</i>)	56
b. Konsep Nilai (<i>Value</i>)	57
c. Efisiensi (<i>Efficiency</i>)	57
1) Efisiensi Pareto	57
2) Efisiensi Kaldor-Hicks.....	58
2.2.2. Pembaruan Hukum Ekonomi	59
Bab III Metodologi Penelitian.....	63
3.1. Jenis Penelitian	63
3.2. Pendekatan Penelitian.....	65
3.3. Bahan Hukum.....	68
3.3.1. Bahan Hukum Primer.....	68
3.3.2. Bahan Hukum Sekunder	70
3.3.3. Bahan Hukum Tersier	71

3.3.4. Bahan Non-Hukum	72
3.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan	72
3.4.1. Studi Kepustakaan.....	73
3.4.2. Wawancara.....	74
3.5. Penalaran dan Sifat analisis Penelitian Hukum	76
Bab IV Pembahasan dan Analisis.....	79
4.1. Indeks Kemudahan Berusaha (<i>Ease of Doing Business Index</i>).....	79
4.1.1. Umum.....	79
4.1.1.1. Indeks <i>Ease of Doing Business</i> dan Kaitannya dengan Kebutuhan Reformasi Kerangka Hukum	84
4.1.1.2. Mengapa Indeks <i>Ease of Doing Business</i> ?	86
4.1.2. Melihat Lebih Jauh Indeks Kemudahan Berusaha Dibandingkan dengan Indeks Lainnya	93
4.2. Bagaimana Pengaturan Yang Berlaku Di Indonesia Terkait Dengan Indikator Tertentu pada Indeks Kemudahan Berusaha	98
4.2.1. Memulai Usaha (<i>Starting A Business</i>)	98
4.2.1.1. Umum	98
4.2.1.2. Pengaturan yang Berlaku pada Indikator Memulai Usaha	101
4.2.2. Memperoleh Pembiayaan (<i>Getting Credit</i>).....	103
4.2.2.1. Umum	103
4.2.2.2. Pengaturan tentang Memperoleh Pembiayaan (<i>Getting Credit</i>)	106
4.2.3. Perlindungan Investor Minoritas (<i>Protecting Minority Investors</i>)	111
4.2.3.1. Umum	111
4.2.3.2. Kerangka Hukum	112
4.2.4. Penegakan Kontrak (<i>Enforcing Contract</i>)	114
4.2.4.1. Umum	114
4.2.4.2. Kerangka Hukum yang Berlaku pada Kerangka Penegakan Kontrak	117
4.2.5. Penyelesaian Kepailitan (<i>Resolving Insolvency</i>).....	120
4.2.5.1. Umum	120
4.2.5.2. Pengaturan Terkait Penyelesaian Kepailitan	121
4.3. Bagaimana Pelaksanaan Reformasi Regulasi Atas Peraturan Terkait Dengan Indikator Tertentu Indeks EoDB	124

4.3.1. Reformasi Regulasi pada Indikator <i>Starting a Business</i>	124
4.2.1.1. Deregulasi Perijinan Secara Umum	125
4.2.1.2. Reformasi Regulasi Terkait Pendirian Perseroan Terbatas.....	127
a. Relaksasi Perubahan Ketentuan Modal Disetor Perseroan Terbatas	127
b. Implementasi Sistem Pendaftaran Badan Usaha Berbasis Elektronik	129
c. Pelayanan Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan.....	134
d. Pendaftaran Jaminan Sosial Kesehatan Secara Online	134
e. Peninjauan Kembali Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Perizinan Memulai Usaha.....	136
f. Mengatur Khusus Biaya Pembuatan Akta Notaris untuk Pendirian Perseroan Terbatas.....	136
g. Penyederhanaan Proses Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	138
h. Pengundangan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	139
4.2.1.3. Pengundangan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Perijinan Berusaha	147
a. Dinamika Penyusunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	147
b. Ketentuan yang Relevan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	149
1) Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha.....	150
2) Ketenaga Kerjaan.....	151
3) Kemudahan , Perlindungan , serta Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	153
c. Beberapa Aspek Penting dalam Hukum di Bidang Ekonomi pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	164
1) Perizinan Berbasis Risiko	165
2) Perijinan Usaha di Daerah	174
3) Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	177
4.3.2. Reformasi Regulasi pada Indikator <i>Getting Credit</i>	185
a. Modernisasi Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	185

1) Peluncuran Fidusia Online (2013)	185
2) Pengembangan Fungsionalitas Pendaftaran Fidusia Online (2014)	186
3) Pengembangan Fitur Pelaporan dan Informasi Detail (2015) .	187
4) Akses Publik Terhadap Pendaftaran, Perubahan dan Pencabutan Pendaftaran (2016).....	188
5) Tahapan yang Belum Rampung: Migasi Data Lama.....	189
b. Operasionalisasi Biro Kredit Swasta Sebagai Penunjang Industri Pembiayaan.....	189
4.3.3. Reformasi Regulasi pada Indikator <i>Protecting Minority Investors</i> ...	192
4.3.4. Reformasi Regulasi pada Indikator <i>Enforcing Contract</i>	194
4.3.4.1. Menekan Jangka Waktu Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata Biasa	195
4.3.4.2. Memperkenalkan Prosedur Mediasi Wajib.....	196
4.3.4.3. Memperkenalkan Prosedur Gugatan Sederhana	198
a. Jenis Gugatan	201
b. Batasan Nilai Gugatan	202
c.. Prosedur yang Cepat, Sederhana, Biaya Ringan.....	204
1) Prosedur yang Cepat	204
2) Sederhana.....	206
d. Penyempurnaan Prosedur Gugatan Sederhana pada Tahun 2019	209
4.3.4.4. Memperkenalkan Modernisasi Manajemen Perkara.....	214
a. Informasi Perkara Mahkamah Agung	215
b. Direktori Putusan Pengadilan	216
c. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).....	219
d. Pengadilan Elektronik.....	222
1) Pendaftaran Elektronik	223
2) Pembayaran Perkara Secara Elektronik	225
3) Pemanggilan Secara Elektronik	227
4) Persidangan Secara Elektronik	228
4.3.4.5. Melakukan Reformasi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.....	231
4.3.5. Reformasi Regulasi pada Indikator <i>Resolving Insolvency</i>	231
4.3.5.1. Pengaturan Tentang Honorarium Jasa Kurator dan Pengurus .	232

4.3.5.2. Petunjuk Praktek Mahkamah Agung untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Perkara Kepailitan dan PKPU	239
4.3.5.3. Tata Kelola Profesi Kepailitan.....	241
4.3.6. Mengelola Reformasi Regulasi untuk Mendorong Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia	244
4.3.6.1. Kebijakan Perencanaan Hukum Indonesia Terhadap Kemudahan Berusaha	244
4.3.6.2. Politik Reformasi Hukum Ekonomi dan Perspektif Tujuan Hukum	247
4.3.6.3. Pembaruan Regulasi secara <i>a Whole Government Approach</i> ..	249
4.3.6.4. Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.....	252
a. Umum	252
b. Pembentukan Komite Peningkatan Daya Saing Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	256
c. Pandangan Umum Terhadap Keberhasilan Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah.....	261
4.3.6.5. Kontribusi Pemerintah yang Relevan Lainnya	265
a. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang	265
1) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	265
2) Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Jaminan Benda Bergerak.....	271
b. Pembuatan Kajian dan Rekomendasi	275
4.3.6.6. Kontribusi Mahkamah Agung Republik Indonesia	276
4.3.7. Mengelola Reformasi Regulasi untuk Mendorong Peringkat Kemudahan Berusaha di Beberapa Negara	284
4.2.8.1. Elemen Utama Praktik Terbaik Pengelolaan Reformasi Regulasi Dalam Rangka Kemudahan Berusaha	284
4.2.8.2. Pengalaman Thailand.....	286
4.2.8.3. Pengalaman Malaysia	288
4.2.8.4. Pengalaman Korea Selatan	292
4.4. Bagaimana Pengaturan Ideal Atas Kerangka Hukum Pada Indikator Tertentu Survei Kemudahan Berusaha.	296
4.4.1. Pengaturan Ideal atas Kerangka Regulasi pada Indikator <i>Starting a Business</i>	296

4.3.1.1.	Kesenjangan dengan Kinerja Negara Lain pada Survei Kemudahan Berusaha	296
4.3.1.2.	Kerangka Hukum yang Belum Optimal	302
4.4.2.	Pengaturan Ideal atas Kerangka Regulasi pada Indikator <i>Getting Credit</i>	303
4.3.2.1.	Umum	303
4.3.2.2..	Pembahasan Setiap Indikator	304
a.	Indeks Kekuatan Hak Hukum (<i>Strenght of Legal Rights Index</i>) .	304
b.	Indeks Kedalaman Informasi Kredit (<i>Depth of credit information index</i>)	316
4.3.2.3	Kebutuhan Reformasi Praktek Terbaik Internasional.....	319
4.3.2.4	Analisis Normatif Empiris Terhadap Kinerja Hukum Jaminan Kebendaan Benda Bergerak Indonesia.....	324
a.	Jaminan Benda Bergerak Dalam Angka	324
b.	Kesenjangan di Lapangan.....	328
c.	Efektifitas Hak Mendahulu	333
4.3.2.5.	Beberapa Pemikiran	337
4.4.3.	Pengaturan Ideal atas Kerangka Regulasi pada Indikator <i>Protecting Minority Investor</i>	340
4.3.3.1.	Umum	340
4.3.3.2.	Kesenjangan Dengan Survey Kemudahan Berusaha.....	341
a.	Umum	341
b.	Pembahasan untuk Setiap Parameter	343
1)	Indeks Jangkauan Keterbukaan	343
2)	Indeks Jangkauan Tanggung Jawab Direksi.....	348
3)	Indeks Kemudahan Gugatan Pemegang Saham	355
c.	Indeks Jangkauan Tata Kelola Pemegang Saham.....	363
1)	Indeks Jangkauan Hak Pemegang Saham.....	363
2)	Indeks Jangkauan Kepemilikan dan Pengendalian.....	369
3)	Indeks Jangkauan Transparansi Korporasi	374
4.4.4.	Pengaturan Ideal atas Kerangka Regulasi pada Indikator <i>Enforcing Contract</i>	380
4.3.3.1.	Kesenjangan dengan Survei Kemudahan Berusaha.....	380
a.	Umum	380

b. Perbandingan dengan Kinerja Negara Lain pada Indikator <i>Enforcing Contract</i>	383
c. Pembahasan Untuk Setiap Parameter	386
1) Waktu.....	386
2) Biaya	388
3) Indeks Kualitas Proses Peradilan.....	393
4.3.3.2 Analisis Empiris Normatif terhadap Implementasi aspek <i>Enforcing Contract</i> di Indonesia	421
a. Informasi yang Tidak Tersedia tentang Kinerja Eksekusi	421
b. Biaya dan Waktu.....	423
c. Masalah Teknis	424
1) Eksekusi Benda Bergerak	424
2) Eksekusi Benda Tidak Bergerak.....	425
4.3.3.3 Pembahasan Lainnya Tentang <i>Enforcing Contract</i>	425
a. Praktek Terbaik Penegakan Kontrak di Negara Lain.....	427
1) Australia.....	427
2) Thailand	430
3) China.....	434
4) Belanda	437
b. Pembelajaran dari Studi Komparasi <i>Enforcing Contract</i> di Negara Lain.....	442
1) Menciptakan Situasi Pendukung yang Memastikan Kepatuhan Debitur	442
2) Implementasi Teknologi Informasi.....	444
3) Integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Keuangan dan Hak Milik Kebendaan.....	445
4) Prosedural Institusional dan Tata Laksana	446
4.4.5. Pengaturan Ideal atas Kerangka Regulasi pada Indikator <i>Resolving Insolvency</i>	447
4.4.5.1. Umum	447
4.4.5.2. Pembahasan Untuk Setiap Parameter	448
a. Waktu, Biaya dan Tingkat Pemulihan Utang.	451
1) Waktu.....	451
2) Biaya	451

3) Tingkat Pemulihan (<i>Recovery Rate</i>).....	452
b. Indeks Prosedur Awal Kepailitan	453
c. Indeks Pengurusan Aset Debitur.....	454
d. Indeks Rencana Perdamaian	457
e. Indeks Partisipasi Kreditur.....	460
4.4.5.3. Kesenjangan Dengan Praktek Terbaik.....	463
a. Analisis Empiris Normatif Terhadap Sistem Hukum Kepailitan di Indonesia.....	463
1) Jumlah Permohonan Pailit yang difasilitasi oleh Proses Kepailitan Tidak Mencerminkan Skala Ekonomi Indonesia.....	463
2) Pertumbuhan jumlah Permohonan PKPU yang sangat tinggi beberapa tahun terakhir.....	469
3) Minimnya Akses Terhadap Informasi Proses Pasca Kepailitan	471
4) Kedudukan Pengadilan Niaga dalam UU Kepailitan	473
b. Praktek Terbaik Penyelesaian Kepailitan di Negara Lain	477
(1) Tata Kelola Sistem Kepailitan.....	477
(2) Akses Informasi Pengurusan dan Pemberesan Kepailitan pada Negara Lain	485
4.4.5.4. Beberapa Pemikiran	488
4.4.6. Peluang Peningkatan Peringkat Indeks EoDB	490
4.4.6.1. Kerangka Hukum yang Ada Tidak Memenuhi Indikator Indeks EoDB	491
4.4.6.2. Kesalahan Tim Survei Doing Business dalam Memahami Regulasi	491
4.4.6.3. Pembaruan Belum atau Tidak Dikonfirmasi oleh Tim Survei Doing Business	492
Bab V Penutup	497
5.1. Kesimpulan.....	497
5.2. Saran	499
DAFTAR PUSTAKA	502
Buku.....	502
Peraturan Perundang-undangan	506
Peraturan Perundang-undangan Indonesia	506
Peraturan Perundang-undangan Negara Lain	515

Laporan Penelitian/ Presentasi	516
Artikel / Tulisan.....	521
Sumber Internet.....	525
Berita	529



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peringkat Burden of Regulation Indonesia	16
Tabel 2 Tabel Tipe Hukum	37
Tabel 3 Indikator yang Diukur oleh Survei Kemudahan Berusaha (12 Indikator pada tahun 2020)	80
Tabel 4 Peringkat Indonesia dalam Survey Kemudahan Berusaha 2012-2024	82
Tabel 5 Peringkat Kemudahan Berusaha RI di Kawasan ASEAN (6 negara teratas)	82
Tabel 6 Keunggulan dan Keterbatasan Metodologi Survei EoDB	83
Tabel 7 Irisan Indikator Survey EoDB dengan Kerangka Hukum Ekonomi.....	85
Tabel 8 Perbandingan Indikator pada GPI Tertentu	95
Tabel 9 Catatan Kinerja Peringkat SAB 2014-2020.....	98
Tabel 10 Perbandingan Peringkat Memulai Usaha (Starting a Business) ASEAN	99
Tabel 11 Jumlah Subyek Hukum Terdaftar pada Ditjen AHU (juli 2021).....	102
Tabel 12 Kinerja Indonesia dalam Indikator Getting Credits Survei Kemudahan Berusaha.....	105
Tabel 13 Kinerja Indikator Enforcing Contract Survei Kemudahan Berusaha Indonesia	115
Tabel 14 Perkembangan Indikator Resolving Insolvency	120
Tabel 15 Rangkuman Upaya Reformasi regulasi perijinan.....	127
Tabel 16 Perbandingan Biaya PNBP antara PP Nomor 45 Tahun 2014 dengan PP Nomor 45 Tahun 2016	136
Tabel 17 Perbandingan Biaya Jasa Hukum Pendirian Perseroan Terbatas UMKM	137
Tabel 18 Perbandingan Konsep Awal RUU Cipta Kerja Kemudahan Berusaha dengan Kluster Akhir UU Cipta Kerja.....	148
Tabel 19 Dasar Penghitungan Potensi Terjadinya Bahaya	168
Tabel 20 Perkembangan Skor Indonesia pada Indikator EC	194
Tabel 21 Rangkuman Paket Kebijakan Ekonomi I-XVI.....	254
Tabel 22 Distribusi Indikator EoDB dengan Kementerian/ Lembaga Terkait ...	255
Tabel 23 Daftar Kajian Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kemudahan Berusaha oleh Bdan Pembinaan Hukum Nasional	275
Tabel 24 Prosedur Memulai Usaha Berdasarkan Hasil Survei EoDB 2020	296
Tabel 25 Perbandingan Praktek Terbaik Memulai Usaha pada 3 Negara di ASEAN	299
Tabel 26 Jenis-Jenis Usaha Perusahaan Pembiayaan.....	306
Tabel 27 Pembagian Jenis Usaha Pembiayaan	330
Tabel 28 Tabel Perkembangan Skor EoDB Perlindungan Investor Minoritas ...	340
Tabel 29 Perbandingan Kinerja Indikator EC pada Beberapa Negara Terpilih..	383
Tabel 30 Honorarium Advokat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Thailand.....	384
Tabel 31 Perbandingan Temuan Survey EoDB dengan Aturan Formil.....	387
Tabel 32 Temuan Survey EoDB pada Biaya Penyelesaian Sengketa.....	388

Tabel 33 Perbandingan antara Biaya Temuan Survey dengan Biaya yang Berlaku	391
Tabel 34 Perbandingan antara Biaya Temuan Survey dengan Biaya yang Berlaku	392
Tabel 35 Total Perbandingan antara Estimasi Hasil Survey dengan Tarif Berlaku	393
Tabel 36 Struktur Tarif Biaya Eksekusi Belanda.....	441
Tabel 37 Pendaftaran Perkara Kepailitan dan PKPU 2016-2020	464
Tabel 38 Perbandingan Tata Kelola Kepailitan Perbandingan Beberapa Negara.....	480
Tabel 39 Rangkuman Analisis Peluang Klarifikasi Indikator dengan Indeks Hukum pada Survei EoDB 2020.....	490

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pertumbuhan PDB ASEAN 2000-2018	6
Gambar 2 Contoh Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Online	187
Gambar 3 Implementasi Mediasi di Pengadilan	198
Gambar 4 Skema Litigasi Perdata Konvensional.....	208
Gambar 5 Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana 2015-Juni 2021	211
Gambar 6 Tangkapan Layar Info Perkara Kepaniteraan MARI	216
Gambar 7 Generasi 1 Direktori Putusan	217
Gambar 8 Direktori Putusan-Generasi 2	218
Gambar 9 Direktori Putusan- Generasi 3	219
Gambar 10 Sejarah Pengembangan SIPP	222
Gambar 11 Grafik Pendaftaran Perkara Perdata dengan E-Filing	230
Gambar 12 Peta Regulasi & Kebijakan Kemudahan Berusaha Indonesia.....	247
Gambar 13 Struktur Organisasi Komite Peningkatan Daya Saing Nasional	258
Gambar 13 Struktur Tata Kelola Pemudah Malaysia	290
Gambar 14 Komposisi Keanggotaan Pemudah	291
Gambar 15 Struktur Organisasi Regulatory Reform Committee Korea Selatan	293
Gambar 17 Tangkapan Layar Fidusia Online pada bulan Maret 2021	312
Gambar 18 Statistik Pendaftaran, Perubahan, Pencabutan Jaminan Fidusia 2000-2020.....	325
Gambar 19 Kategori Obyek yang Didaftarkan 2017	326
Gambar 20 Kategori Obyek yang Didaftarkan dengan Nomor Serial 2017	326
Gambar 21 Kategori Jaminan Tanpa Nomor Serial.....	327
Gambar 22 Fasilitas Penelusuran Informasi Perkara pada SIPP.....	404
Gambar 23 Tangkapan Layar Informasi pada Info Perkara Mahkamah Agung RI	405
Gambar 24 Catatan Kinerja Eksekusi pada Beberapa Pengadilan Tingkat Pertama	422
Gambar 25 Struktur Legal Execution Department Thailand	431
Gambar 26 Pembatasan yang Diberlakukan oleh Pengadilan di China Terhadap Pihak yang Tidak Membayar Hutang	436

Gambar 27 Tangkapan Layar Situs AFSA untuk Penelusuran Informasi Debitur Pailit	485
Gambar 28 Tangkapan Layar Situs ASIC untuk Penelusuran Informasi Debitur Pailit	486
Gambar 29 Tangkapan Layar Situs Kementerian Kehakiman Belanda untuk Penelusuran Informasi Debitur Pailit	487

